

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pemikiran Sukarno berakar pada sikap anti-kapitalisme dan anti-imperialisme. Kritiknya terhadap sistem kapitalis dan imperialisme erat kaitannya dengan cita-cita mewujudkan masyarakat Indonesia yang bebas dari penindasan Kolonial Belanda. Hal ini tercermin dalam pidatonya yang terkenal, “Indonesia Menggugat”, di mana Sukarno secara tajam mengecam imperialisme dan kolonialisme sebagai sumber utama penderitaan rakyat Indonesia.<sup>1</sup> Realitas ketidakadilan sosial dan ekonomi yang dialami pribumi menjadi dorongan utama bagi Sukarno untuk merumuskan dasar perjuangan kemerdekaan. Ia menyaksikan bagaimana pemerintah kolonial secara licik mengatur sistem perdagangan yang merugikan pribumi, serta merampas tanah-tanah milik nenek moyang mereka. Dalam kondisi demikian, kaum bangsawan justru bersikap oportunistik, mementingkan kepentingan pribadi alih-alih membantu rakyat.<sup>2</sup>

Sukarno melihat betapa liciknya pemerintah kolonial Belanda telah memberikan penderitaan kepada rakyatnya. Perdagangan diatur oleh pemerintah kolonial Belanda dimana pemasukan bagi pribumi sangat sedikit, tanah – tanah nenek moyang pribumi diambil secara licik oleh penjajah. Hingga pribumi harus tinggal di lahan yang sempit, ditambah lagi dengan para bangsawan yang serakah, bukannya membantu rakyat yang kesusahan malah memikirkan keuntungannya sendiri.<sup>3</sup>

Penderitaan ini pula yang mengilhami Sukarno mengenai kaum proletar di Indonesia. Sukarno menyatakan bahwasannya proletar Indonesia yang disebut marhaen harus menjadi elemen dalam tiap – tiap perjuangan kemerdekaan dan

---

<sup>1</sup> Peter kasenda, “Sukarno Muda : Biografi Pemikiran Tahun 1922 – 1933”, (Jakarta, komunitas bambu, 2010) hlm 38.

<sup>2</sup> Sukarno, 1926. Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme, dalam *Fikiran Ra'jat* yang dimuat di buku “*Di Bawah Bendera Revolusi*” (Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1964) hlm 17-18

<sup>3</sup> W. I. Lenin. “*Imperialisme Tahap Tertinggi Kapitalisme*” (Jakarta : Yayasan Pembaharuan, 1958) hlm 20

Marhaenisme adalah perjuangan serta asas yang menghendaki hilangnya tindakan kapitalisme dan imperialisme. Menarik untuk dicermati bagaimana Sukarno pada tahun 1926 mampu memadukan tiga arus pemikiran yang saat itu berpengaruh luas di Indonesia, yakni Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Ketiga aliran pemikiran ini mempunyai gerakan politik yang sama yaitu kesatuan, kemerdekaan dan mempunyai musuh yang sama yakni Belanda.

Marhaenisme tidak dapat dipisahkan dari berbagai pengaruh pemikiran barat maupun timur yang disintesakan oleh Sukarno. Dalam buku otobiografinya yang berjudul *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat* menjelaskan bagaimana ia dapat melahirkan marhaenisme itu sendiri. Tahun 1922, Sukarno muda memutuskan pindah ke Bandung untuk melanjutkan studinya, kota Bandung telah berkembang menjadi tujuan pergerakan adalah kemerdekaan penuh untuk tanah air.<sup>4</sup> Gagasan-gagasan ini dikembangkan oleh pemimpin Indische Partij yang akhirnya mempengaruhi Sukarno dan Bandung menampilkan sebagai pusat alam pemikiran nasionalis sekuler.<sup>5</sup>

Dari kota itu berkenalan dengan banyak tokoh-tokoh pergerakan seperti Dr. Douwes Dekker (Dr. Danudirja Setiabudi) dan Tjipto Mangunkusumo. Pemikiran yang diperkenalkan itu terlihat berbeda dengan pemikiran sebelumnya. Dalam pandangan Douwes Dekker yang terpenting untuk Indonesia adalah memperoleh kemerdekaan penuh untuk tanah air, dimana bangsa yang merdeka itu terdiri dari masyarakat yang multirasial dan yang penting adalah menunjukkan kesetiiaannya kepada tanah air dan bersedia berjuang untuk memperoleh kemerdekaan.<sup>6</sup>

Istilah marhaen menurut John Ingleson<sup>7</sup> merupakan kata dalam bahasa sunda yang digunakan oleh Sarekat Islam pada awal 1920-an yang berarti petani kecil. Dari kata marhaen itulah timbul konsep “Marhaenisme”. Gagasan Marhaenisme dipengaruhi oleh pemikiran Marx, Hegel dan Engels serta tokoh-tokoh berpengaruh

---

<sup>4</sup> Peter Kasenda, “*Sukarno Muda: Biografi Pemikiran 1926-1933*”, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2010) hlm. 4

<sup>5</sup> Peter Kasenda, *Loc. cit*

<sup>6</sup> John D. Legge, *Sukarno: Sebuah Biografi Politik*.(Jakarta: Sinar Harapan, 1985) hlm.30

<sup>7</sup> John Ingleson. “*Jalan Ke Pengasingan*”. (Jakarta, LP3ES, 1983) hlm. 213.

dalam kelahiran Marxis. Konsep Marhaenisme sangat erat dengan marxisme, bisa dikatakan bahwa Marhaenisme adalah akar dari Sosialisme. Sukarno menegaskan bahwa Marhaenisme adalah Sosialisme dalam praktek Indoensia.<sup>8</sup> Sukarno menggunakan analisis sosial Marxisme pada kondisi sosial masyarakat Indonesia, perlunya konsep proletar serta pentingnya massa rakyat menunjukkan bahwa pandangannya tentang perlawanan terhadap imperialisme.

Konsep ini bagi Sukarno telah memecahkan suatu masalah yang merisaukannya selama bertahun-tahun. Sukarno mengemukakan bahwa suatu perjuangan kelas masyarakat Indonesia sudah tak terelakkan lagi, akhirnya konsep Marhaenisme yang memungkinkannya untuk lebih menempatkan perjuangan ke dalam pengertian kelas secara nasional.<sup>9</sup>

Dalam artikelnya dengan judul “ *Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi* “ dalam Fikiran Ra’jat 1932, Sukarno menjelaskan Marhaenisme memiliki tiga asas yang terdiri dari 1). Sosio-Nasionalisme, 2). Sosio-Demokratis, dan 3). Ketuhanan Yang Maha Esa. Sosio-Nasionalisme menekankan pentingnya nasionalisme yang berpijak pada semangat kebersamaan dan keadilan sosial. Nasionalisme yang dimaksud Sukarno bukanlah nasionalisme yang egois atau sempit, melainkan nasionalisme yang mengakui dan memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat, terutama golongan kecil dan tertindas. Dengan demikian, Sosio-Nasionalisme menggabungkan rasa cinta tanah air dengan solidaritas sosial sebagai dasar membangun bangsa yang merdeka, adil, dan makmur<sup>10</sup>.

Marhaenisme bukan tiruan dari praktik demokrasi barat, konsep demokrasi barat tidak memberikan perbaikan kepada kaum marhaen baik secara ekonomis atau politis. Sebagai contoh Sukarno memberikan gagasan bahwasannya demokrasi parlementer hanya menguntungkan kaum kapitalisme, kaum borjuis dan rakyat duduk di dalam parlemen akan tetapi kaum proletar ditindas sehingga menimbulkan

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 89 – 90.

<sup>9</sup> Peter Kasenda, *Op. cit* hlm. 51

<sup>10</sup> Sukarno, 1927. Dimanakah Tindjumu dalam *Fikiran Ra’jat* yang dimuat di buku “*Di Bawah Bendera Revolusi*” Jilid I (Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1964) hlm. 36

pengangguran. Titik tolak Sukarno adalah melawan penjajah dan membebaskan penderitaan rakyat.<sup>11</sup>

Sosio-demokrasi merupakan system yang tidak hanya melayani kaum elite saja, tetapi bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan rakyat kecil. Ide sosio – demokrasi merupakan usaha untuk kembali dan percaya kepada kekuatan sendiri tanpa meniru unsur-unsur Barat yang dinilai bersifat negatif. Sosio – nasionalisme menurut Sukarno adalah nasionalisme marhaen yang tidak mempunyai sifat serakah yang merupakan ciri-ciri imperialisme.<sup>12</sup>

Strategi nasionalis Marhaen adalah *machtvorming* yang berarti proses mengakumulasi kekuatan untuk menaikkan daya kuasa politik. Dalam bahasa sederhananya menurut penulis membangun susunan strategi kekuatan agar mempunyai daya kuasa untuk memenangkan kepentingan politik. Dalam pelidoi pembelaannya, “*Indonesia Menggugat*” di mahkamah Belanda di Den Haag pada 1930, dalam gerakan politik untuk melawan imperialisme Sukarno mempunyai caranya tersendiri<sup>13</sup>. Pertama, politik *Divide et impera* harus dijawab dengan tekad persatuan Indonesia. Sebab dengan persatuanlah akan menjadikan Indonesia kuat. Kedua, dekadensi akal budi penguasa kolonial harus dihadapi dengan lebih banyak pendidikan rakyat dan mengurangi buta huruf di kalangan rakyat. Ketiga, penanaman kepercayaan bahwa rakyat Indonesia adalah kelas kambing. Maka PNI bertekad “percaya pada kekuatan diri sendiri – bekerja sendiri” sebagai azas PNI. Keempat, menjalankan gerakan politik persatuan dalam menghadapi kolonial. Maka PNI tidak mau mengadakan Kerjasama nonkooperasi dengan pihak penjajah kolonial.<sup>14</sup>

Berbicara soal massa aksi, Sukarno terinspirasi dari seorang pemikir sosialis yaitu Karl Kautsky. Kebanyakan ide Sukarno tentang organisasi dan massa aksi

---

<sup>11</sup> Peter Kasenda, *op. cit* hlm. 53

<sup>12</sup> Sukarno. “*Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi dan Sekali Lagi Tentang Sosio – Nasionalisme dan Sosio – Demokrasi*”, dalam Fikiran Ra’jat, 1932, dimuat dalam Dibawah Bendera Revolusi, 1964) hlm 125

<sup>13</sup> Sukarno. “*Indonesia Menggugat*”, (Jakarta : Inti Idayu Press, 1983) hlm. 92 – 93.

<sup>14</sup> Mohammad Hatta. “*Indonesia Merdeka*”, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976) hlm 97 – 126.

tampak banyak terpengaruh dari pemikir sosialis itu.<sup>15</sup> Sedangkan massa aksi kaum marhaen adalah “massa - aksi kaum rakyat jelata yang karena kesengsaraan, telah terluluh menjadi satu jiwa baru yang radikal, massa aksi yang sudah dilakukan pada waktu itu adalah mendirikan perhimpunan, menulis artikel pada majalah surat kabar, mengadakan rapat-rapat umum, mengadakan kursus – kursus dan aksi demonstrasi. Jadi melalui aksi semacam itulah nantinya diharapkan kekuasaan kolonial dapat ditumbangkan oleh rakyat Indonesia.<sup>16</sup>

Agitasi massa dalam mengembangkan PNI sebagai partai massa, tidak hanya menciptakan kerangka kerja organisasi. tetapi juga menyebarkan cita-cita kaum nasionalis untuk Indonesia merdeka seluas mungkin melalui agitasi massa. Sukarno menganggap perlunya pemulihan kembali kepercayaan diri rakyat Indonesia dengan menunjukkan bahwa tidak mustahil memaksakan suatu perubahan dalam sistem kolonial. Melalui pidato – pidatonya yang dibimbing oleh kemampuan retorika yang tinggi dan dikemas sederhana membangkitkan dalam pikiran pendengarnya, imaji mereka kekal.

Bahkan rapat-rapat umum sebagai pameran kekuatan nasionalis makin menjadi-jadi, menganggap bahwa rapat di lapangan terbuka serta pawai yang riuh merupakan suatu kebutuhan pokok dalam pendidikan politik massa. Sebab Sukarno percaya bahwa dengan gerakan ini akan memberikan tekanan kepada penjajah kolonial. Dengan seperti ini membangkitkan suatu kesadaran masyarakat untuk melawan pemerintah kolonial.

Proritas utama PNI adalah dalam lapangan politik. PNI menganggap bahwa kecurangan-kecurangan kolonialisme dapat diakhiri dengan adanya gerakan kemerdekaan politik. Untuk itu jalan yang harus ditempuh dalam mewujudkan cita – cita Indonesia Merdeka adalah dengan usaha bangsa sendiri dalam suatu gerakan yang terpadu, tanpa memandang kelas dan agama<sup>17</sup>. PNI memperlihatkan sifat evolusioner dalam bidang sosial serta ekonomi untuk menarik perhatian dan

---

<sup>15</sup> Roger K Paget (ed). “*Indonesia Accuses : Sukarno’s Defence Oration on the Political Trial of 1930*”. (Kuala Lumpur : Oxford University Press, 1975) hlm 57 - 58

<sup>16</sup> Sukarno *Op.cit* hlm 192 – 202.

<sup>17</sup> Peter Kasenda *Op.,cit* hlm. 57 – 58.

dukungan seluas mungkin dari berbagai golongan, rasa percaya diri kepada kekuatan diri sendiri senantiasa digunakan untuk menyatakan bahwa perbaikan hidup tidak boleh mengaharap kepada penjajah selain melalui usaha – usaha sendiri *self help*<sup>18</sup>.

Suatu kewajaran menurut Sukarno keharusan PNI menggunakan dasar atau azasnya dalam gerakan politik, yaitu sikap nonkooperasi secara menyeluruh dan sikap yang diambil dianggapnya merupakan jalan satu – satunya untuk memperoleh pembebasan untuk kembali kepada kekuatan sendiri. Sebab Sukarno melihat adanya pertentangan kebutuhan antara pihak penjajah dan yang terjajah, sungguh mustahil ketika penjajah memberikan keleluasaan kepada pihak yang terjajah<sup>19</sup>.

Sukarno telah memperkenalkan seperangkat strategi dan konsep Marhaenisme untuk menumbangkan kekuasaan kolonial Hindia Belanda. Ia bukan saja memperkenalkan gagasannya, melainkan juga mengimplementasikan apa yang menjadi keyakinannya dalam praktik sehari-hari. Sukarno gagal menumbangkan kekuasaan yang sangat dibencinya. Kekuasaan itu justru telah membawanya ke pengasingan yang menyebabkan ia jauh dari keramaian politik.

Penelitian skripsi berjudul “Ideologi Marhaenisme Masa Pemerintahan Soekarno Tahun 1950 -1965” yang dibuat oleh Padma Cahyaningtias Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret. Studi Dalam isi skripsi ini menjelaskan terkait ideologi marhaenisme yang masuk dalam pemerintahan masa Soekarno tahun 1950 – 1965 dan lebih terfokus kepada bidang pemerintahnya saja. Sementara dalam penelitian yang dibuat penulis dengan judul Marhaenisme Sebagai Gerakan Politik Di Hindia Belanda Tahun 1922 – 1931. Namun terdapat perbedaan yang signifikan yaitu pada penyajian pembahasan yang terfokus pada konsep dan pelaksanaan ideologi marhaenisme pada masa pemerintahannya tahun 1950-1965.

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas maka peneliti akan menjelaskan keadaan sosial politik di Hindia Belanda, kemunculan Marhaenisme dan

---

<sup>18</sup> John Ingelson *Op.cit.* hlm. 61 – 62.

<sup>19</sup> Bernard Dahm. “*Sukarno and the Struggle for Indonesia Independence*”, (Ithaca : Cornell University Press, 1969) hlm. 128

perkembangannya tahun 1922-1931, serta karakteristik Marhaenisme. Hal tersebut menarik untuk dikaji lebih dalam karena pada tahun 1922-1931 Marhaenisme memiliki peran penting dalam memobilisasi massa rakyat Indonesia dalam gerakan politik serta memperjuangkan kemerdekaan

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana marhaenisme dalam gerakan politik di Hindia Belanda tahun 1922 – 1931?”

1. Bagaimana latar belakang lahirnya gagasan Marhaenisme di Hindia Belanda tahun 1922-1926?
2. Bagaimana kondisi sosial politik sebelum adanya Marhaenisme di Hindia Belanda tahun 1922-1926?
3. Bagaimana Marhaenisme dalam gerakan politik di Hindia Belanda tahun 1927 - 1931?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan keadaan sosial dan politik sebelum adanya gagasan Marhaenisme muncul di Hindia Belanda 1922-1926
2. Mendeskripsikan latar belakang lahirnya gagasan Marhaenisme di Hindia Belanda tahun 1922-1926.
3. Mendeskripsikan Marhaenisme dalam gerakan politik di Hindia Belanda tahun 1927– 1931.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk bahan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk menambah wawasan, penelaahan kajian sejarah, serta memberikan informasi tentang “ Marhaenisme Dalam Gerakan Politik Di Hindia Belanda Tahun 1922 – 1931”.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

### 1. Bagi peneliti selanjutnya

Manfaat penelitian ini adalah berfungsi sebagai bahan rujukan, sebagai informasi mengenai perkembangan ideologi politik di Indonesia dan sebagai referensi mengenai karya tulis ilmiah tentang Marhaenisme Dalam Gerakan Politik Di Hindia Belanda Tahun 1922 – 1931.

### 2. Bagi Akademisi

Penelitian ini bermanfaat bagi pembaca untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai sejarah Indonesia khususnya tentang marhaenisme dalam gerakan politik tahun 1922 – 1931.

### 3. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk lebih memahami bagaimana marhaenisme ini bisa menjadi sebuah strategi dalam gerakan politik tahun 1922 – 1931 di Hindia Belanda.

## 1.5 Tinjauan Teoritis

### 1.5.1 Kajian Teoritis

#### 1.5.1.1 Teori Nasionalisme

Nasionalisme merupakan kekuatan yang besar, baik etnis maupun budaya. Nasionalisme secara politis adalah manifestasi dari kesadaran segenap manusia yang mempunyai cita – cita dan pendorong bagi suatu bangsa, untuk merdeka dan lepas dari penjajahan. Etos nasionalisme dapat diartikan sebagai sikap, watak, karakter dan keyakinan atas kesadaran nasional yang mengandung keinginan bagi suatu bangsa untuk merdeka dari penjajahan. sebagai pendorong untuk membangun dirinya dan lingkungan masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut Otto Bauer<sup>20</sup> salah satu pemikir sosialis, mengatakan bahwa nasionalisme (*nation*) sebagai suatu komunitas karkater yang terbentuk dari kesamaan sejarah, pengalaman hidup dan perkembangan budaya yang sama. Dengan kata lain, nasionalisme menurut Bauer berakar pada kesadaran bersama yang timbul karena pengalaman hidup kolektif dalam satu komunitas.

---

<sup>20</sup> Otto Bauer. “*The Question of Nationalities And Social Democracy*” (diterjemahkan oleh J. O’Donnell, Minneapolis : University of Minnesota Press, 2000) hlm 102



Nasionalisme dan persatuan adalah landasan utama dalam gerakan politik kaum marhaen. Sukarno dan para pemimpin pergerakan berusaha membangun kesadaran nasional berdasarkan pengalaman hidup rakyat kecil (marhaen) yang selama masa kolonial mengalami penindasan secara kolektif. Akibat dari pengalaman hidup yang keras dibawah penjajahan, kemudian timbulah suatu kesadaran kolektif untuk lepas dari penjajahan dan harapan ingin merdeka.

Dalam kerangka ini, Bauer menekankan bahwa nasionalisme muncul sebagai bentuk reaksi terhadap ketidaksetaraan dan dominasi, khususnya dalam konteks multi-nasionalitas dalam satu negara. Bagi Bauer, perjuangan nasional harus dibaca sebagai bagian dari perjuangan emansipasi sosial yang lebih luas. Bangsa yang tertindas secara nasional juga kerap kali mengalami penindasan secara ekonomi, sehingga perjuangan nasional sejatinya tidak dapat dipisahkan dari perjuangan kelas. Oleh karena itu, nasionalisme yang ideal menurut Bauer adalah nasionalisme yang mendukung pembebasan kolektif dan keadilan sosial lintas kelompok, bukan yang membentuk hierarki antarbangsa.

Demikian marhaenisme menekankan pentingnya persatuan, solidaritas dan identitas nasional yang lahir dari pengalaman bersama rakyat dalam menghadapi Kolonialisme Belanda. Nilai – nilai perjuangan, penderitaan dan harapan untuk merdeka menjadi pondasi utama pembentukan komunitas karakter sebagaimana yang dijelaskan oleh Otto Bauer di atas.

#### 1.5.1.2 Teori Gerakan Sosial

Secara etimologi gerakan adalah aksi sosial berbentuk gerakan secara kelompok informal berupa organisasi, dalam jumlah besar atau individu yang berfokus pada suatu isu – isu sosial, budaya dan politik dengan menerima, menolak atau menyuarakan suatu transformasi sosial<sup>21</sup>.

Gerakan sosial merupakan respons kolektif terhadap ketidakadilan sosial yang dirasakan oleh kelompok tertentu dalam masyarakat. Dalam perspektif teori sosial kontemporer, gerakan sosial tidak hanya dipahami sebagai bentuk protes, tetapi

---

<sup>21</sup> AB Widyanta. “*Problem Modernitas Dalam Kerangka*”. (Yogyakarta : Cielaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2002) hlm. 12

juga sebagai medium perubahan sosial yang berakar pada struktur dan dinamika kekuasaan yang timpang<sup>22</sup>. Para pemikir kontemporer menyoroti bahwa gerakan sosial tumbuh dari ketegangan antara kondisi objektif yang menindas dan kesadaran subjektif yang berkembang dalam komunitas atau kelas tertentu. Oleh karena itu, gerakan sosial dapat dilihat sebagai artikulasi politik dari kepentingan-kepentingan yang selama ini terpinggirkan dalam sistem sosial.

Gerakan sosial merupakan perilaku paling penting dari bentuk perilaku kolektif. gerakan sosial merupakan bentuk paling signifikan dari perilaku kolektif. Namun, sebagian sosiolog menilai bahwa gerakan sosial lebih tepat dipahami sebagai tindakan kolektif daripada perilaku kolektif, sebab keduanya memiliki perbedaan. Meski demikian, ada pula yang mengklasifikasikan gerakan sosial sebagai salah satu bentuk perilaku kolektif.<sup>23</sup>

Menurut Macionis Gerakan sosial dibagi menjadi 4 tipe sebagai berikut.

(1) Gerakan Sosial Alternatif (*Alternative Social Movement*) merupakan jenis gerakan sosial yang ancamannya terhadap tatanan yang ada relatif kecil. Hal ini karena sasaran perubahannya hanya terbatas pada sebagian kelompok masyarakat. Contoh nyata dari gerakan ini adalah *Promise Keepers*, sebuah gerakan yang mendorong laki-laki Kristen untuk lebih taat beragama sekaligus lebih peduli terhadap keluarga.

(2) Gerakan Sosial Pembebasan (*Redemptive Social Movement*) memiliki fokus yang lebih spesifik, tetapi menekankan pada perubahan yang bersifat mendasar dan radikal pada individu.

(3) Gerakan Sosial Reformasi (*Reformative Social Movement*) ditujukan pada perubahan terbatas yang menyasar seluruh anggota masyarakat. Gerakan ini umumnya muncul dalam lingkup politik, baik dalam bentuk progresif yang memperjuangkan pola sosial baru maupun dalam bentuk reaktif yang berupaya mempertahankan status *quo* melalui gerakan tandingan (*countermovements*). Salah

---

<sup>22</sup> Goldblatt, Dkk “*Teori-Teori Sosial Kontemporer Paling Berpengaruh*” (Penerbit: IRCiSoD. 2019) hlm. 225

<sup>23</sup> Sukmana Oman.“*Teori dan Konsep Gerakan Sosial*” (Intrans Publishing : Malang, 2016) hlm. 12

satu contohnya adalah gerakan *Multiculturalism*, yang memperjuangkan kesetaraan ras dan etnis melalui jalur politik maupun pendidikan.

(4) Gerakan Sosial Revolusioner (*Revolutionary Social Movement*) merupakan bentuk gerakan sosial yang paling radikal dibandingkan tipe lainnya. Gerakan ini bertujuan untuk melakukan transformasi mendasar terhadap keseluruhan struktur masyarakat.

Berdasarkan keempat tipe gerakan sosial yang dikemukakan oleh Macdonis, gerakan sosial yang paling mendekati kepada marhaenisme dalam gerakan politik di Hindia Belanda adalah gerakan sosial revolusioner. Karena marhaenisme yang dibawa oleh Sukarno bertujuan untuk melakukan suatu perubahan terhadap struktur masyarakat Indonesia pada saat itu Hindia Belanda, untuk terbebas dari belenggu penjajahan dan penindasan yang dilakukan oleh Kolonialisme Belanda dan bangsawan pribumi.

### **1.5.2 Kajian Pustaka**

Penelitian mengenai marhaenisme dalam gerakan politik tahun 1922 – 1931 berupaya memanfaatkan sejumlah beberapa literature yang dapat memberikan informasi tentang sejarah nasional Indonesia, perkembangan berbagai pemahaman politik, pergerakan organisasi politik serta perkembangan berbagai aliran pemikiran di Indonesia pada masa penjajahan Kolonialisme Belanda.

Pertanyaan penelitian pertama tentang kondisi sosial politik tahun 1922 - 1926 akan menggunakan 3 pustaka yaitu buku yang ditulis oleh *Peter Kasenda*, kumpulan tulisan *Sukarno* yang di muat dalam “Buku Dibawah Bendera Revolusi” dan *Dewan Pimpinan SOBSI* Buku Peter Kasenda yang berjudul "Pemikiran Sukarno Muda Tahun 1922–1933". menyajikan analisis mengenai fase awal pemikiran Sukarno muda, buku ini menceritakan konstruksi pemikiran sukarno muda yang saat itu menjadi bagian penting lahirnya *The Age of Ideology* di Indonesia. Sukarno dengan agitasi, massa aksi serta radikalisme anti imperialisme dan anti kapitalisme menjadikan sikap dan garis politiknya. Melalui informasi dari buku ini diperoleh latar belakang keadaan sosial dan politik pada masa penjajahan kolonial Belanda yang menjadi faktor pendorong gagasan Marhaenisme lahir.

Buku yang berjudul “*Dibawah Bendera Revolusi* “ Jilid I merupakan salah satu karya monumental Sukarno yang berisi kumpulan pidato, tulisan, dan artikel yang dibuatnya sejak awal masa perjuangan kemerdekaan hingga masa setelah Proklamasi. Buku ini pertama kali diterbitkan oleh Panitia Penerbitan Dibawah Bendera Revolusi pada tahun 1964, dan kemudian menjadi salah satu rujukan penting dalam memahami pemikiran politik, gagasan, serta visi kebangsaan Sukarno terhadap Indonesia. Marhaenisme, sebagaimana dijelaskan dalam buku ini, menjadi dasar filosofis bagi perjuangan politik Sukarno dalam memimpin rakyat menuju kemerdekaan dan kemandirian bangsa. Melalui tulisan-tulisannya dalam buku ini, memberikan informasi mengenai landasan filosofis dari perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme, serta menguraikan pentingnya kesadaran nasional sebagai kekuatan pembebas rakyat dari segala bentuk penindasan.

Buku “*Sejarah Perjuangan Kelas Buruh di Indonesia 1905–1955*” yang ditulis oleh Dewan Pimpinan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) diterbitkan oleh Garda Merah. Buku ini memuat narasi historis yang berpijak pada perspektif perjuangan kelas (*class struggle*), di mana kaum buruh ditempatkan sebagai kekuatan sosial revolusioner yang memiliki peranan penting dalam proses pembebasan nasional hasil dari partisipasi aktif dan pengorbanan kaum buruh di berbagai sektor produksi seperti perkebunan, pabrik gula, dan transportasi. Dalam periode 1920-an, misalnya, gerakan buruh banyak dipengaruhi oleh ide-ide sosialisme dan komunisme yang diperkenalkan melalui Partai Komunis Indonesia (PKI) ide-ide tersebut memberi landasan bagi perjuangan kaum buruh untuk menentang sistem kolonial Belanda yang eksploitatif. Melalui buku ini diperoleh informasi mengenai kondisi sosial buruh dan gerakan politik yang dilakukan kaum buruh tertindas kepada kolonialisme Belanda.

Pertanyaan penelitian kedua tentang latar belakang berkembangnya Marhaenisme di Hindia Belanda tahun 1922-1926 akan menggunakan 3 pustaka yaitu Sukarno buku yang berjudul “*Dibawah Bendera Revolusi*” Jilid 1. Kemudian Ignasius Gatut Saksono dengan judul buku “*Marhaenisme Bung Karno : Marxisme ala Indonesia*” terbitan tahun 2008 dan Cindy Adams dengan judul buku dengan

judul “ Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia ” tahun terbit 1965 dan diterbitkan oleh *The Bobs - Merill Company*.

Buku “*Dibawah Bendera Revolusi*” memuat mengenai faktor yang melatarbelakangi berkembangnya Marhaenisme. Sukarno juga menekankan bahwa Marhaenisme bukan hanya konsep ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi politik dan sosial. Ia mengaitkan perjuangan kaum Marhaen dengan misi besar yaitu, Revolusi Indonesia membebaskan bangsa dari kolonialisme dan menciptakan masyarakat yang adil dan berdaulat atas sumber daya ekonominya. Semangat berdikari, persatuan nasional, dan antiimperialisme merupakan pilar utama yang membentuk konstruksi gagasan Marhaenisme. `

Kemudian buku “Marhaenisme Bung Karno : Marxisme ala Indonesia” karya Ign. Gatut Saksono. Buku ini memuat mengenai historis munculnya pemikiran Sukarno tentang Marhaenisme, kemudian buku ini membeberkan mengenai penafsiran Marhaenisme oleh para politisi dari generasi Sukarno sampai dengan generasi masa kini.

Buku “Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat” ini membahas mengenai biografi kehidupan Sukarno, cita-cita politik, konsep Marhaenisme, perjuangan serta harapan-harapan. Dalam buku ini menjelaskan perjumpaan Sukarno dengan sosok petani bernama Marhaen di Bandung menjadi momen simbolik yang kemudian menginspirasi penamaan untuk kaum tertindas yaitu kaum Marhaen. Sukarno mengadaptasi ajaran Marxisme dalam konteks lokal tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya Indonesia.

Pertanyaan penelitian ketiga mengenai Marhaenisme dalam gerakan politik di Hindia Belanda tahun 1927–1931 akan menggunakan 4 pustaka yaitu, Sukarno, Peter Kasenda,

Buku berjudul “*Dibawah Bendera Revolusi*” tahun terbit 1964 yang merupakan karya Sukarno. Buku ini berisi dokumentasi berbagai pidato dan tulisan yang memperlihatkan bagaimana Marhaenisme diterjemahkan ke dalam praktik politik. Dalam buku ini, Sukarno mengulas secara historis perkembangan perjuangan politiknya, termasuk dalam peranannya di PNI dan perlawanan terhadap kebijakan kolonial Belanda. Konsolidasi massa menjadi agenda utama perjuangan politiknya.

Di sinilah peran penting Marhaenisme sebagai alat pengorganisasi dan agitasi politik. Pertanyaan penelitian ketiga mengenai Marhaenisme dalam gerakan politik di Hindia Belanda tahun 1927–1931 akan menggunakan 5 pustaka yaitu, Sukarno, Peter Kasenda, J. Eliso Racamora, Ign. Gatut Saksono

Buku berjudul “ *Dibawah Bendera Revolusi* ” tahun terbit 1964 yang merupakan karya Sukarno. Buku ini berisi dokumentasi berbagai pidato dan tulisan yang memperlihatkan bagaimana Marhaenisme diterjemahkan ke dalam praktik politik. Dalam buku ini, Sukarno mengulas secara historis perkembangan perjuangan politiknya, termasuk dalam peranannya di PNI dan perlawanan terhadap kebijakan kolonial Belanda. Konsolidasi massa menjadi agenda utama perjuangan politiknya. Di sinilah peran penting Marhaenisme sebagai alat pengorganisasi dan agitasi politik.

Dalam bukunya mengenai pemikiran Sukarno muda. Kasenda menegaskan bahwa tahun 1927–1931 merupakan fase ketika Sukarno mematangkan gagasan Marhaenisme sebagai sintesis antara nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Pada fase inilah Sukarno mengembangkan konsep *massa-aksi*, *machtsvorming* (pembentukan kekuatan), serta strategi agitasi sebagai sarana mobilisasi politik. Kasenda juga menyoroti bagaimana Marhaenisme menjadi ideologi yang bersifat praksis, membumi, dan disesuaikan dengan realitas sosial rakyat Hindia Belanda.

Buku dengan judul “ *Nasionalisme Mencari Ideologi: Bangkit dan Runtuhnya PNI 1946-1965* ” J. Eliso Racamora memberikan perspektif teoritis mengenai Marhaenisme sebagai bentuk *ideologi kerakyatan* yang dipengaruhi oleh Marxisme, namun dibedakan oleh konteks Indonesia yang agraris dan tidak sepenuhnya proletaris. Racamora menilai bahwa Marhaenisme berfungsi sebagai instrumen politik yang memungkinkan Sukarno mengorganisasi berbagai lapisan rakyat kecil—petani, buruh, dan pekerja informal ke dalam satu identitas perjuangan yang sama. Pendekatan ini memberikan legitimasi ideologis bagi strategi perlawanan yang digunakan PNI antara tahun 1927 dan 1931.

Buku dengan judul “ *Pokok-Pokok Ajaran Marhaenisme* ” diterbitkan tahun 2004 cetakan ke empat oleh Media Pressindo di Yogyakarta, menjadi dasar konseptual yang penting dalam memahami isi dan arah pemikiran Marhaenisme. Buku ini

merupakan kumpulan penjelasan resmi Sukarno tentang pokok-pokok pemikirannya, yang meliputi prinsip-prinsip dasar seperti *Sosio-Nasionalisme*, *Sosio-Demokrasi*, dan *Ketuhanan Yang Maha Esa*. Dalam penjelasannya, Sukarno menegaskan bahwa Marhaenisme bukanlah duplikasi dari sosialisme atau komunisme Eropa, melainkan sebuah bentuk perjuangan sosial yang bercirikan Indonesia. Sosio-Nasionalisme merupakan nasionalisme yang berpijak pada semangat kebangsaan dan solidaritas antar kelas sosial, bukan nasionalisme elitis. Sedangkan Sosio-Demokrasi mengedepankan demokrasi yang berpihak kepada rakyat kecil, tidak sekadar prosedural, tetapi substantif.

Dalam bukunya "*Marhaenisme Bung Karno: Marxisme ala Indonesia*" menguatkan pandangan bahwa Marhaenisme adalah adaptasi kreatif Sukarno terhadap Marxisme. Saksono menyoroti bagaimana Sukarno menolak materialisme dalam Marxisme klasik dan menggantinya dengan unsur religiusitas serta nilai kebangsaan. Dalam konteks praktik politik 1927–1931, Saksono menekankan bahwa Marhaenisme dipakai sebagai legitimasi moral dan ideologis untuk melawan kapitalisme kolonial serta untuk memperkuat solidaritas nasional.

### **1.5.3 Hasil Penelitian Yang Relevan**

Pertama, skripsi yang dibuat oleh Padma Cahyaningtias Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret. "Ideologi Marhaenisme Masa Pemerintahan Soekarno Tahun 1950 – 1965", Studi Dalam isi skripsi ini menjelaskan terkait ideologi marhaenisme yang masuk dalam pemerintahan masa Sukarno tahun 1950 – 1965 dan lebih terfokus kepada bidang pemerintahannya saja.

Persamaannya adalah sama sama meneliti marhaenisme dan menggunakan metode historis. Adapaun perbedaannya penelitian sebelumnya membahas mengenai marhaenisme dalam masa pemerintahan Soekarno tahun 1950 – 1965, dan membahas marhaenisme dalam segi pemerintahan orde lama masa Soekarno. Sementara dalam penelitian yang dibuat penulis dengan judul "Marhaenisme Dalam Gerakan Politik Di Hindia Belanda Tahun 1922 – 1931". Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dalam kurun waktu atau tahun, segi pembahasan yang

condong kepada gerakan politik dengan memunculkan marhaenisme sebagai landasan pergerakannya. Penelitian ini mengungkap bagaimana konsep Marhaenisme muncul, berkembang, dan diaplikasikan dalam konteks perlawanan politik terhadap kolonialisme Belanda.

Kedua, skripsi berjudul “Pemikiran Marhaenisme Sukarno Dalam Perspektif Filsafat Sosial” yang dibuat oleh Farid Jurusan Filsafat Agama, Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kebaruan penelitian ini terletak pada cara memandang Marhaenisme sebagai gerakan politik yang bersifat praktis dan kontekstual, bukan hanya sebagai ideologi atau pemikiran filsafat Sukarno. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya membahas Marhaenisme sebagai gagasan normatif, ideologi negara, atau kajian filsafat sosial, terutama pada masa pemerintahan Sukarno setelah kemerdekaan. Sedangkan pada penelitian yang penulis buat memiliki perbedaan dalam masa awal kemunculan dan perkembangan Marhaenisme di Hindia Belanda.

Fokus ini penting karena Marhaenisme pada periode tersebut masih berfungsi sebagai alat perjuangan rakyat di bawah tekanan kolonial, belum menjadi ideologi resmi negara. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan kajian yang belum banyak membahas Marhaenisme dalam konteks kolonial pra-kemerdekaan. Selain itu, kebaruan penelitian ini juga terletak pada penekanan Marhaenisme sebagai strategi mobilisasi politik, yang diwujudkan melalui praktik non-kooperasi, agitasi massa, pembentukan kekuatan (*machtsvorming*), serta pengorganisasian rakyat melalui Partai Nasional Indonesia (PNI). Marhaenisme tidak hanya dipahami sebagai konsep, tetapi sebagai pedoman nyata dalam menggerakkan massa rakyat kecil (*marhaen*) untuk melawan kolonialisme Belanda.

Ketiga, sebuah jurnal dengan judul “ Penerapan Ajaran Marhaenisme Bung Karno Dalam Membentuk Tatanan Sosial Yang Adil dan Makmur” yang ditulis oleh Yadri Irwansyah, Jurnal Perspektif Pendidikan tahun 2017. Menjelaskan tentang marhaenisme sebagai paham ajaran untuk membentuk tatanan sosial masyarakat yang madani lewat prinsip marhaenisme yakni berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam berpolitik dan berkepribadian dalam berkebudayaan. Adapun persamaan penelitian tersebut adalah untuk membentuk gerakan sosial masyarakat lewat



paham marhaenisme sehingga tercipta tatanan sosial masyarakat yang mandiri, adil dan makmur tanpa harus menggantungkan kehidupannya kepada pihak asing.

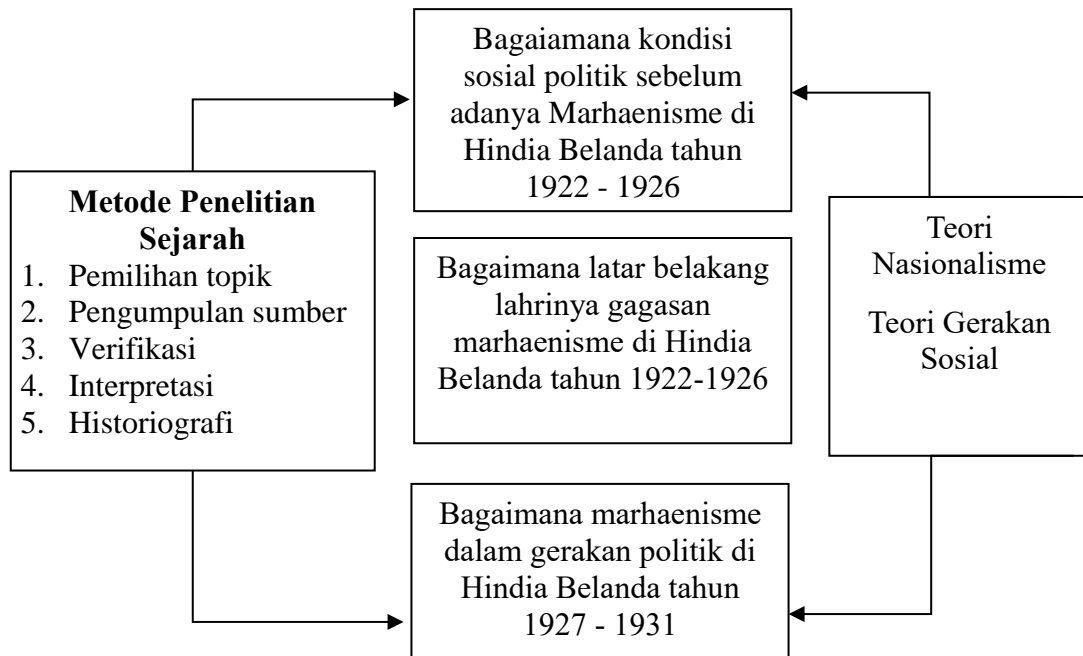
Penelitian yang dibuat penulis memiliki perbedaan terletak pada peran marhaenisme sebagai alat perlawanan politik. Penelitian ini juga dapat mengungkap bagaimana marhaenisme menjadi alat konsolidasi dalam memperkuat solidaritas rakyat kecil melawan penjajah sehingga tercipta perubahan gerakan sosial masyarakat dalam segi ekonomi, budaya dan politik.

Keempat, jurnal dengan judul “ Marhaenisme : Telaah Pemikiran Soekarno Tahun 1927 – 1933”. Ditulis oleh Cici Eliya Melawati tahun 2018. Menjelaskan tentang dasar - dasar apa yang melatarbelakangi konsep marhaenisme ini bisa terbentuk. Hasil penelitian tersebut menunjukkan marhaenisme lahir dari respon masyarakat akibat dari penindasan yang dilakukan oleh kolonial Belanda terhadap pribumi. Adapun persamaan dalam penelitian terdahulu yaitu membahas terkait karakteristik marhaenisme dan menggunakan metode penelitian historis.

Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu pada fokus penelitian yang condong membahas tentang faktor – faktor pembentukan marhaenisme secara eksternal dan internal. Sedangkan pada penelitian ini memfokuskan pada pembahasan tentang marhaenisme dalam gerakan politik di Hindia Belanda pada tahun 1922 – 1931.

#### **1.5.4 Kerangka Konseptual**

Penelitian ini mengkaji mengenai Marhaenisme Dalam Gerakan Politik di Hindia Belanda Tahun 1922–1931, dimulai dari bagaimana latar belakang marhaenisme muncul, berkembang dan diaplikasikan dalam konteks perlawanan politik terhadap pemerintah kolonialisme Belanda. Marhaenisme ini turut menjadi landasan bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kontribusi Marhaenisme dalam membangun kesadaran politik dan menumbuhkan nasionalisme untuk melawan tindakan penjajahan dan eksploitasi Kolonialisme Belanda. Dalam penulisan penelitian ini penulis telah menyusun kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Konseptual

## 1.6 Metodologi Penelitian Sejarah

### 1.6.1 Metode Penelitian

Metode ini menggunakan metode penelitian sejarah sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kuntowijoyo, metode sejarah terdiri dari pemilihan topik, pengumpulan sumber, interpretasi dan penulisan sejarah atau historiografi sebagai syarat melakukan penelitian sejarah.

#### a. Pemilihan Topik

Sebelum melakukan sebuah penelitian, penulis menentukan topik yang akan dibahas. Karena penulis tertarik dengan sejarah pergerakan kemudian penulis meneliti tentang marhaenisme dalam gerakan politik. Pada akhirnya penulis memilih topik pembahasan penelitian tentang “ Marhaenisme Dalam Gerakan Politik Di Hindia Belanda Tahun 1922 – 1931 ”. Selain itu penulis juga mengumpulkan data – data yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan yang ada kaitannya dengan penelitian yang penulis lakukan. Hal itu berkaitan untuk

memperkuat analisis dan membandingkan konsep yang ada di buku – buku, serta data penelitian yang relevan lainnya.

### **b. Heuristik**

Penulis menyusun proposal penelitian ini dimulai dari mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan tema penelitian penulis. Sumber-sumber tersebut penulis dapatkan dari buku koleksi pribadi maupun jurnal yang terbit serta kajian literatur yang sudah dipelajari sebelumnya. Untuk memanfaatkan media internet penulis mencari sumber yang relevan melalui *Google* cendikia. Sumber yang biasa digunakan terdiri dari sekunder dan primer . Sumber primer merupakan taraf yang paling tinggi dibandingkan sumber sekunder.

Sumber primer pada penelitian ini adalah buku yang berjudul “ Sukarno Muda : Biografi Pemikiran Tahun 1922 – 1933” tahun terbit 2010, cetakan pertama ditulis oleh Peter Kasenda. Pada buku ini dijelaskan tentang konstruksi pemikiran Sukarno ketika muda (1926 – 1933) saat itu sukarno menjadi bagian penting *lahirnya The Age of Ideology* (zaman ideologi) di Indonesia. Sukarno memecahkan ketenangan *rust and orde* (keamanan dan ketertiban) kolonial dengan hingar binger agitasi, duyunan massa aksi dan kobaran api radikalisme anti imperialisme – kapitalisme.

Sumber selanjutnya adalah buku “ Dibawah Bendera Revolusi”. Tahun terbit 1964 cetakan pertama jilid ke-3. Pada buku ini dijelaskan berbagai aliran ideologi, pandangan politik, serta panduan untuk revolusi Indonesia dalam rangka meraih kemerdekaan dari penjajahan. Buku ini merupakan kumpulan majalah tulisan Sukarno dalam fikiran rakyat yang kemudian dimuat jadi buku. Menjelaskan skisah hidup Sukarno hingga lahirnya Marhaenisme serta perjalanan pergerakannya sampai kemerdekaan berlangsung.

Selanjutnya sumber yang dikategorikan sekunder adalah buku karya Cindy Adams, yang berjudul ” Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat”. Buku ini merupakan edisi revisi pertama terbitan tahun 2007. Buku ini menggambarkan perjalanan hidup Bung Karno, mulai dari masa kecilnya, perjuangannya melawan penjajahan, hingga perannya sebagai pemimpin kemerdekaan Indonesia. Buku ini

juga membahas terkait konsep marhaenisme yang menjadi landasan bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Sumber selanjutnya buku dengan judul "Pokok – Pokok Ajaran Marhaenisme" buku ini diterbitkan tahun 2004 cetakan ke empat oleh Media Pressindo di Yogyakarta. Buku ini menjadi rujukan terkait fokus penulis untuk memahami buah pemikiran Sukarno terkait konsep marhaenisme dalam gerakan sosial dan politik.

Sumber sekunder kedua Buku berjudul Nasionalisme Mencari Ideologi: Bangkit dan Runtuhnya PNI 1946–1965 karya J. Eliso Racamora memberikan perspektif teoritis mengenai Marhaenisme sebagai ideologi kerakyatan yang dipengaruhi oleh Marxisme, namun dibedakan oleh konteks sosial Indonesia yang agraris dan tidak sepenuhnya proletaris. Racamora menjelaskan bahwa Marhaenisme berperan sebagai instrumen politik yang memungkinkan Sukarno mengorganisasi berbagai lapisan rakyat kecil—seperti petani, buruh, dan pekerja informal—ke dalam satu identitas perjuangan. Pandangan ini memberikan landasan ideologis yang penting untuk memahami strategi perlawanan PNI pada periode 1927–1931.

Sumber sekunder ketiga Buku Marhaenisme Bung Karno: Marxisme ala Indonesia memperkuat pandangan bahwa Marhaenisme merupakan bentuk adaptasi kreatif Sukarno terhadap Marxisme. Saksono menyoroti bagaimana Sukarno menolak unsur materialisme dalam Marxisme klasik dan menggantinya dengan nilai-nilai religiusitas serta kebangsaan. Dalam konteks praktik politik tahun 1927–1931, Saksono menegaskan bahwa Marhaenisme digunakan sebagai dasar moral dan ideologis untuk melawan kapitalisme kolonial sekaligus memperkuat solidaritas nasional.

### **c. Verifikasi**

Tahap kritik sumber yang dilakukan yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Pertama adalah melakukan kritik eksternal yaitu berhubungan dengan sumber keaslian itu sendiri, dalam kritik eksternal menganalisis dan menilai salah satu sumber yang paling konkrit berdasarkan data – data yang sudah ada dikumpulkan.

Pada sumber yang dikategorikan primer yaitu karya Peter Kasenda dengan judul bukunya " Pemikiran Sukarno Muda tahun 1926-1933 " kritik intern, buku ini menjelaskan tentang konstruksi pemikiran Sukarno Ketika masih muda 1926 –

1933. saat itu ia mulai berkonsentrasi pada tema sentral perjuangannya yaitu nasionalisme, islamisme dan marxisme. Ketiga aliran politik ini disintesakan dan akan sangat efektif untuk mencapai Indonesia Merdeka. Kritik intern dalam interpretasi seorang Peter Kasenda menafsirkan pemikrian Sukarno muda ke dalam tulisan – tulisan dan pidatonya, namun hal ini terlalu dipengaruhi oleh sudut pandang penulis sehingga terdapat resiko bias serta beberapabagian buku memuat narasi yang kurang konsisten, misalnya terkait hubungan Sukarno dengan organisasi lain. Kritik ekstern pada buku ini Peter Kasenda menggunakan sumber primer seperti surat kabar, tulisan Sukarno serta arsip mengenai Sukarno. Namun beberapa sumber sulit diverifikasi keasliannya karena konteks tahun 1920-an yang terbatas, penggunaan foto dokumentasi yang jarang ditampilkan sehingga pembaca sulit membandingkan keasliannya. Buku ini didapat dari hasil membeli dari toko online.

Sumber selanjutnya yang dikategorikan sekunder adalah karya Sukarno judul bukunya ” Dibawah Bendera Revolusi” buku ini didapat oleh penulis dari koleksi buku – buku keluarga. Buku ini terbit tahun 1964 cetakan pertama jilid ke tiga, pada kritik intern buku ini ditulis atau merupakan hasil karya Soekarno itu sendiri. Tahap kritik eksternal buku ini masih menggunakan ejaan Soewandi, cover bukunya menggunakan kain beludru warna biru tua, serta tulisannya hasil dari mesin ketik manual.

Selanjutnya sumber sekunder adalah buku karya Cindy Adams, judul bukunya ” Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat”. Buku ini merupakan edisi revisi pertama terbitan tahun 2007. Pada kritik intern buku ini dikategorikan relevan karena Cindy Adams menjadikan Soekarno sebagai narasumber untuk membahas biografi tokoh proklamator ini. Pada tahapan kritik eksternal buku ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris tahun 1965 oleh Cindy Adam, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Banyak dijadikan sumber rujukan dalam penulisan sejarah dan studi tentang Sukarno, membuktikan keberadaannya sebagai sumber yang diakui legalitasnya.

Sumber sekunder yang kedua adalah buku ”Pokok – Pokok Ajaran Marhaenisme” buku ini diterbitkan tahun 2004 cetakan ke empat oleh Media

Pressindo di Yogyakarta. Buku ini menjadi rujukan terkait fokus penulis untuk memahami buah pemikiran Sukarno terkait konsep marhaenisme dalam gerakan politik. Pada tahap kritik intern penulis menemukan banyak pokok pembahasan terkait marhaenisme, hal ini sejalan dengan yang penulis akan teliti serta kaji namun perlu dipadukan dengan kajian lain yang empiris dan analitis. Buku ini mempunyai potensi bias karena buku ini bersifat argumentative dan ideologis sehingga kurangnya mendefinisikan lawan lawan politik atau ideologi lain. buku ini masih karangan Soekarno dokumenasi fisik buku ini dapat ditemukan di perpustakaan nasional serta toko buku, informasi katalogisnya terdapat di Perpustakaan Nasional RI. Buku ini cocok dijadikan sumber penunjang dalam meneliti sejarah yang membahas Sukarno, buku ini diakui secara resmi sebagai dari literatur politik di Indonesia.

Jurnal dengan judul “ Penerapan Ajaran Marhaenisme Dalam Membentuk Tatanan Sosial Yang Adil dan Makmur” yang ditulis oleh Yadri Irwansyah, Jurnal Perspektif Pendidikan tahun 2017. Menjelaskan tentang ideologi marhaenisme sebagai paham ajaran untuk membentuk tatanan sosial masyarakat yang madani lewat prinsip marhaenisme yakni berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam berpolitik dan berkepribadian dalam berkebudayaan.

Peneliti sudah membandingkan antara satu sumber sejarah dengan sumber yang lainnya, serta sudah diverifikasi bahwa sumber yang peneliti dapatkan relevan dengan penelitian yang akan diteliti.

### **c. Interpretasi**

Pada tahap interpretasi penulis menetapkan keterkaitan anatara sumber-sumber sejarah yang sudah diverifikasi untuk melihat hubungan fakta yang terdapat dalam sumber-sumber sejarah. Dalam langkah interpretasi dibagi menjadi tahapan analisis dan sintesis. Pada tahap interpretasi ini dilakukan menggunakan tahap analisis, penulis menganalisis sumber-sumber untuk mengetahui bagaimana Marhaenisme dalam gerakan politik tahun 1922-1931. Definisi Marhaenisme adalah konsep ajaran yang menempatkan kaum kecil (buruh kecil, petani kecil dan kaum tertindas lainnya) sebagai subjek utama perjuangan kaum nasionalis dan sosial.

Marhaenisme adalah ajaran pembebasan, sekaligus identitas perjuangan untuk melawan penjajahan kolonial Belanda.

Setelah melakukan kritik sumber selanjutnya peneliti mencoba menginterpretasikan hasil dari sebuah buku yang berjudul Sukarno Muda : Biografi Pemikiran Tahun 1922 – 1926” selanjutnya “Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat” karya Cindy Adam tahun 1966 dan buku dengan judul “ Dibawah Bendera Revolusi” karya Soekarno tahun 1959, dan Buku dengan judul Pokok – pokok ajaran Marhaenisme. Berdasarkan sumber yang dikritik terkait dengan buku – buku tersebut ternyata memiliki fakta bahwa dari keempat buku tersebut adalah marhaenisme adalah sebuah paham pembebasan rakyat kecil, lahir dari pengamatan Sukarno atas realitas sosial Indonesia menggunakan kacamata marxisme dan menekankan perlawanan terhadap penindasan ekonomi maupun politik, bukan hanya sekadar meniru sosialisme barat.

Marhaenisme juga berbeda dengan marxisme, Sukarno menjelaskan bahwa marhaenisme memiliki kemiripan dengan marxisme dalam hal memperjuangkan keadilan sosial, tetapi keduanya berbeda. Marhaenisme lebih kontekstual untuk Indonesia, karena marhaenisme tidak menolak agama, sementara Marxisme sering dianggap antiagama. Marhaen kaum rakyat kecil, tidak sepenuhnya dianggap kaum proletariat ( buruh tanpa alat produksi) melainkan memiliki alat produksi sendiri.

#### **d. Historiografi**

Historiografi adalah upaya untuk menyusun fakta – fakta sejarah menjadi narasi yang koheren dan bermakna. Sehingga sejarah tidak hanya menjadi mitos atau legenda. Historiografi adalah tahap proses penulisan sejarah yang berdasarkan pada data atau informasi yang ditemukan dari berbagai sumber yang telah melewati semua tahapan. Dalam penulisan historiografi harus disusun secara objektif dan sistematis. Pada tahap ini penulis akan menguraikan dari hasil penafsiran atau interpretasi atas fakta – fakta sejarah yang ditemukan lalu kemudian akan dituangkan menjadi sebuah tulisan yang disusun dalam per bab secara kronologis.

#### **1.6.2 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan gerakan sosial untuk melihat Marhaenisme sebagai bentuk aksi kolektif rakyat. Marhaenisme bukan sekadar

gagasan, melainkan juga sebuah gerakan massa yang mengorganisasi petani kecil, buruh, dan rakyat tertindas untuk melakukan perubahan sosial-politik. Dengan mengacu pada teori gerakan sosial, Marhaenisme dapat dipahami sebagai gerakan sosial revolusioner yang bertujuan mengubah struktur masyarakat kolonial secara menyeluruh melalui massa-aksi, agitasi, non-kooperasi, dan pembentukan kekuatan *machtsvorming*.



Gambar 2. Pendekatan Penelitian

### 1.7 Sistematika Pembahasan

Pada tahap ini peneliti akan menguraikan informasi sesuai dengan rumusan masalah yang dijabarkan melalui sistematika pembahasan bab 1 sampai bab 5. Penelitian yang berjudul “ Marhaenisme Dalam Gerakan Politik di Hindia Belanda Tahun 1922 – 1931 ” terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Pada BAB I berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, serta tinjauan teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan pada bagian ini penulis menjadikan sebagai landasan penelitian agar



sesuai dengan pembahasan dan memiliki titik fokus yang jelas serta terarah. Selain itu hal ini juga berguna untuk memperjelas apa masalah yang diangkat, dimana batasan masalahnya dan bagaimana rumusan masalahnya.

Selanjutnya di BAB II akan membahas tentang latar belakang tumbuhnya Marhaenisme di Hindia Belanda. Bab ini membahas kondisi sosial, ekonomi, dan politik Hindia Belanda pada periode 1922–1926 sebagai konteks historis munculnya Marhaenisme. Pembahasan mencakup keadaan sosial masyarakat Hindia Belanda, kesenjangan sosial yang terjadi, karakter imperialisme dan kapitalisme Belanda, serta bentuk-bentuk perlawanan rakyat tertindas. Bab ini bertujuan menjelaskan faktor-faktor struktural yang melatarbelakangi lahirnya gagasan Marhaenisme.

Pada bagian BAB III, Bab ini menguraikan definisi dan hakikat Marhaenisme, faktor-faktor yang memengaruhi munculnya gagasan Marhaenisme, serta landasan filsafat yang membentuknya. Selanjutnya dibahas asas-asas utama Marhaenisme pada periode 1927–1931, yaitu Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi, serta ciri-ciri masyarakat Marhaen sebagai subjek utama dalam perjuangan politik

Pada bagian BAB IV, Bab ini membahas penerapan Marhaenisme dalam praktik gerakan politik dan kepartaian. Pembahasan difokuskan pada asas-asas perjuangan Marhaenisme seperti *machtsvorming*, non-kooperasi, massa aksi, agitasi massa, self reliance, dan self help. Selain itu, bab ini juga mengkaji peran Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai wadah perjuangan Marhaenisme, termasuk strategi konsolidasi kekuatan, propaganda politik, serta dinamika gerakan setelah penangkapan Sukarno dan tokoh-tokoh PNI.

Terakhir pada proposal penelitian ini di BAB V adalah simpulan dan saran. Merupakan bab penutup yang berisi simpulan akhir dari keseluruhan pembahasan, selain itu pada bab ini juga berisi mengenai beberapa saran. Saran akan menjadi beberapa rekomendasi lanjutan tentang penelitian yang sudah dilakukan serta memberikan kemungkinan lain untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan marhaenisme dalam gerakan politik di Hindia Belanda tahun 1922-1931.

## BAB II

### LATAR BELAKANG LAHIRNYA GAGASAN MARHAENISME DI HINDIA BELANDA PERIODE 1922-1926

#### 2.1 Definsi Marhaenisme

Secara umum, gagasan menjelaskan apa yang menjadi unsur paling mendasar dari sebuah hakikat sehingga ia dapat dipahami, dibedakan, dan dianalisis secara konseptual.<sup>24</sup> Gagasan Marhaenisme merujuk pada esensi ideologis yang membentuk dasar pemikiran Sukarno tentang perjuangan rakyat kecil. Gagasan tersebut tidak hanya terbatas pada definisi formal, tetapi mencakup nilai, tujuan, orientasi perjuangan, dan landasan filsafat yang melahirkan Marhaenisme.

Marx dan Sukarno sama-sama mempunyai dasar pemikiran untuk merdeka dari ketertindasan, rasa keprihatinan yang mendalam terhadap nasib mereka yang tertindas, miskin dan dimiskinkan oleh sebuah sistem yang tidak adil. Sebuah tatanan yang mengeksploitasi manusia demi keuntungan segelintir pihak<sup>25</sup>. Bagi Marx, penderitaan kaum proletar yang hidup dalam penindasan dan keterasingan akibat sistem kapitalisme menjadi dorongan utama lahirnya gagasan-gagasannya tentang perubahan dan pergerakan sosial. Dari keprihatinan itulah ia merumuskan sebuah teori perjuangan yang pengaruhnya sangat besar di berbagai belahan dunia.

Teori yang digagas Marx dapat dipahami sebagai seperangkat asas dan hukum yang menjadi landasan bagi upaya menumbangkan sistem penindasan, sekaligus membangun masyarakat baru yang lebih adil dan setara. Gagasan ini menekankan bahwa perubahan tidak akan lahir begitu saja, melainkan harus diperjuangkan secara sadar dan terorganisir oleh mereka yang tertindas<sup>26</sup>. Bagi Sukarno, semangat yang sama juga tampak jelas dalam pandangannya tentang rakyat kecil yang terus mengalami pemiskinan akibat ketimpangan struktural yang dihasilkan oleh kolonial Belanda. Sukarno melihat perlunya perjuangan untuk membebaskan rakyat dari

---

<sup>24</sup> Hasanudin, A. S., & Zulaiha, E. *Loc. cit*, hlm. 205

<sup>25</sup> Ign. Gatut Saksono. "Marhaenisme Bung Karno ; Marxisme ala Indonesia", (Rumah Belajar Yabinkas, 2008) hlm. 62.

<sup>26</sup> *Ibid*, Hlm. 63

belenggu penindasan dengan menumbuhkan kesadaran kolektif agar mereka bangkit memperjuangkan hak-haknya. Dengan begitu, baik Marx maupun Sukarno sesungguhnya berangkat dari landasan moral yang sama: membela kemanusiaan dan menolak segala bentuk ketidakadilan sosial.

Marxisme juga berpengaruh dalam benak Sukarno dan banyak menginspirasi dari pemikiran dan tingkah laku politik Sukarno sejak tahun 1920-an demikian pula tulisan-tulisannya. Bahkan secara jujur Sukarno kemudian mengakui bahwa Marhaenisme yang ia ciptakan adalah Marxisme yang disesuaikan dengan kondisi dan masyarakat Indonesia.<sup>27</sup>

Awal terbentuknya Marhaenisme dapat ditelusuri sejak tahun 1922, ketika Sukarno pindah ke Bandung untuk melanjutkan studi di Technische Hoogeschool (THS). Bandung pada masa itu merupakan pusat dinamika intelektual dan pergerakan nasionalis. Di lingkungan ini, Sukarno mulai terlibat aktif dalam diskusi politik serta membaca berbagai literatur tentang nasionalisme, sosialisme, dan Marxisme.<sup>28</sup> Pengalaman intelektual tersebut mendorong Sukarno untuk melihat bahwa penjajahan Belanda tidak hanya bersifat politik, tetapi juga ekonomi dan sosial. Kesadaran ini menjadi titik awal lahirnya gagasan pembelaan terhadap rakyat kecil yang tertindas oleh sistem kolonial dan kapitalisme Belanda.

Ernest Douwes Dekker (Danudirja Setiabudi) menjadi tokoh yang sangat memengaruhi Sukarno. Douwes Dekker menekankan bahwa nasionalisme Indonesia harus bersifat sekuler, inklusif, dan radikal, dengan tujuan utama mencapai kemerdekaan politik secara penuh dari Belanda. Sukarno banyak menyerap pandangan ini, khususnya gagasan bahwa perjuangan kemerdekaan tidak boleh bergantung pada kompromi dengan pemerintah kolonial, melainkan harus bertumpu pada kekuatan bangsa sendiri.<sup>29</sup>

Melalui interaksi intelektual dengan pemikiran Douwes Dekker dan pemahaman nasionalisme *Indische Partij*, Sukarno mulai mengembangkan pandangan bahwa

---

<sup>27</sup> Ign. Gatut Saksono. *Ibid* hlm.64

<sup>28</sup> Peter Kasenda, “*Pemikiran Sukarno Muda 1922–1933*” (Jakarta: Komunitas Bambu, 2010), hlm. 45–48.

<sup>29</sup> Ruth T. McVey, “*The Rise of Indonesian Communism*,” dalam *Indonesia* No. 1 (1966): 9–12.

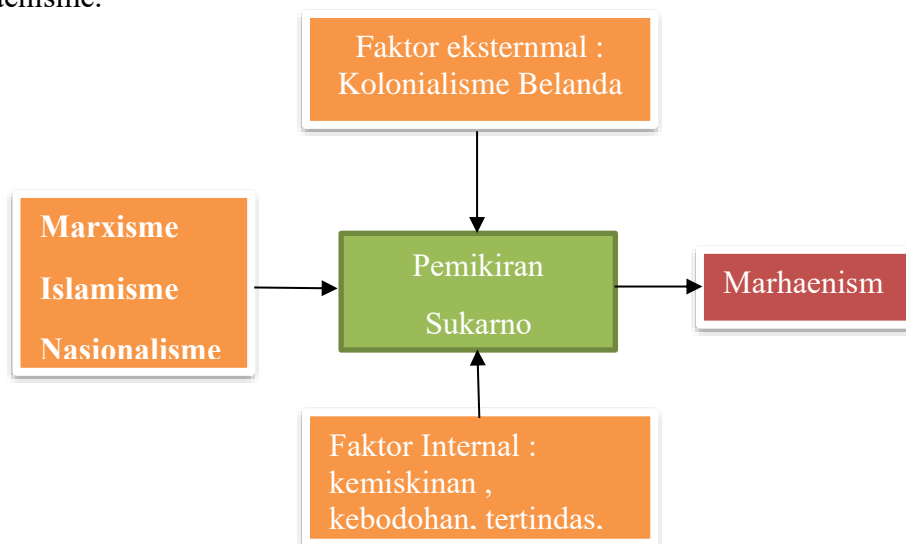
kolonialisme Belanda merupakan sistem penindasan yang harus dilawan secara menyeluruh. Pengaruh nasionalisme sekuler inilah yang kemudian menjadi fondasi awal pemikiran politik Sukarno sebelum ia merumuskan sintesis ideologis yang lebih matang, yang pada akhirnya melahirkan Marhaenisme sebagai gagasan perjuangan rakyat kecil Indonesia.<sup>30</sup>

## 2.2 Faktor Munculnya Gagasan Marhaenisme

Pada tahun 1923–1924, Sukarno semakin intens mengamati kehidupan sosial masyarakat Hindia Belanda, khususnya petani kecil dan buruh. Ia menyadari bahwa rakyat Indonesia tidak sepenuhnya dapat disamakan dengan proletariat industri Eropa sebagaimana dijelaskan dalam Marxisme klasik. Rakyat kecil di Hindia Belanda masih memiliki alat produksi sederhana, tetapi tetap hidup dalam kemiskinan akibat eksploitasi kolonial.<sup>31</sup>

Pengamatan ini melahirkan kritik Sukarno terhadap penerapan teori Barat secara mentah. Ia berkesimpulan bahwa perjuangan rakyat Indonesia membutuhkan konsep yang sesuai dengan struktur sosial dan kondisi bumiputera.<sup>2</sup>

Berikut adalah peta konsep serta faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya Marhaenisme.



Gambar 3 Peta Konsep Faktor yang Mempengaruhi Lahirnya Marhaenisme

<sup>30</sup> Cindy Adams, *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia* (Jakarta: Gunung Agung, 2007), hlm. 98–101.

<sup>31</sup> John Ingleson, *Road to Exile: The Indonesian Nationalist Movement 1927–1934* (Singapore: Heinemann, 1979), hlm. 12–15.